

ANALISIS PROSEDUR PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (STUDI KASUS: KPHP UNIT II SORONG KABUPATEN SORONG)

MARKUS KOCU



**DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**



PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Prosedur Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Studi Kasus: KPHP Unit H Sorong Kabupaten Sorong)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2024

Markus Kocu
E14180112

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

ABSTRAK

MARKUS KOCU. Analisis Prosedur Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Studi Kasus: KPHP Unit II Sorong Kabupaten Sorong). Dibimbing oleh HANDIAN PURWAWANGSA.

Prosedur Pengendalian Peredaran HHK-HA merupakan prosedur yang diterapkan di setiap instansi yang berwenang mengelola hutan alam produksi. Tujuan penelitian ini berupaya untuk menganalisis perangkat aturan, implementasi, dan kesesuaian praktik prosedural di lapangan terhadap ketentuan yang berlaku. Kesesuaian di lapangan menunjukkan bahwa pada periode sebelum revisi ketentuan UUCK Nomor 11 berjalan cukup baik. Akan tetapi, pascarevisi pada praktiknya masih terdapat penyimpangan terhadap prosedur disebabkan oleh perubahan mekanisme dari *official assessment* kepada *self assessment*, tumpang tindihnya aturan, belum adanya pembiayaan operasional, kurangnya tenaga polisi hutan, dan perubahan kewenangan yang dikembalikan ke provinsi sehingga masalah ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap prosedur bagi pemegang izin usaha baik skala kecil hingga skala besar serta memengaruhi pasaran kayu yang cenderung tidak sesuai mekanisme. Solusi bagi kesesuaian prosedural adalah pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi bersama *stakeholder*, memberikan pembiayaan operasional, dan menguatkan tenaga teknis polisi hutan secara kualitas dan kuantitas, serta mengembalikan kewenangan dari provinsi ke kabupaten agar dapat mendukung kesesuaian terhadap prosedural peredaran HHK-HA di KPHP Unit II Sorong.

Kata kunci: perangkat aturan, prosedur, peredaran HHK-HA

ABSTRACT

MARKUS KOCU. Analysis of Procedures for Controlling the Circulation of Natural Forest Timber (Case Study of KPHP Unit II Sorong, Sorong District). Supervised by HANDIAN PURWAWANGSA.

The HHK-HA circulation control procedure is a procedure implemented in every agency authorized to manage production of natural forests. The purpose of this study seeks to analyze the regulatory tools, implementation, and conformity of procedural practices in the field to the applicable provisions. Conformity in the field shows that in the period before the revision, the provisions of UUCK Nomor 11 were quite good. However, post-revision in practice there are still deviations from the procedure due to changes in the mechanism from official assessment to self-assessment, overlapping rules, lack of operational funding, and lack of forest police personnel, as well as changes in authority that are returned to the provinces, so this problem causes non-compliance with procedures for both small-scale and large-scale business license holders and also affects the timber market which tends not to comply with the mechanism. The solution for procedural compliance is for the government to increase collaboration between stakeholders, provide operational funding, and strengthen forest ranger technical personnel in quality and quantity, and return authority from the province to the regency in order to support compliance with HHK-HA circulation procedures in KPHP Unit II Sorong.

Keywords: set of rules, procedures, circulation of HHK-HA



@Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2024
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

ANALISIS PROSEDUR PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (STUDI KASUS: KPHP UNIT II SORONG KABUPATEN SORONG)

MARKUS KOCU

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada
Program Studi Manajemen Hutan

**DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Skripsi:

1. Prof. Dr. Ir. Noor Farikhah Haneda, MS
2. Dra. Sri Rahayu, MSi



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Studi Kasus: KPHP Unit II Sorong Kabupaten Sorong)
Nama : Markus Kocu
NIM : E14180112

Disetujui oleh

Pembimbing:
Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si.

Diketahui oleh

Ketua Departemen Manajemen Hutan
Dr. Soni Trison, S.Hut, M.Si.
NIP 197711232007011002

Tanggal Ujian:
1 Februari 2024

Tanggal Lulus: 18 FEB 2025



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Prosedur Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu Hutan Alam: (Studi Kasus KPHP Unit II Sorong Kabupaten Sorong)” berjalan dengan baik.

Penulis berterima kasih kepada Dr. Handian Purwawangsa. S.Hut, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu setia membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga berterima kasih kepada orang tua, rekan-rekan penulis, dan berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara materil dan moril. Penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam membangun tulisan skripsi ini.

Bogor, Januari 2024

Markus Kocu



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kesatuan Pengelolaan Hutan	5
2.2 Prosedur Pengendalian Peredaran HHK-HA	6
2.3 Permasalahan Peredaran HHK-HA	7
III METODE PENELITIAN	8
3.1 Waktu dan Tempat	8
3.2 Alat dan Bahan	8
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	8
3.4 Pengolahan dan Analisis Data	8
IV GAMBARAN UMUM	10
4.1 Kilas Sejarah Kabupaten Sorong	10
4.2 Kilas Pembentukan KPHP Unit II Sorong	11
4.3 Struktur Organisasi KPHP Unit II Sorong	11
4.4 Visi dan Misi KPHP Unit II Sorong	12
V HASIL DAN PEMBAHASAN	13
5.1 Perangkat Aturan Prosedur Peredaran HHK-HA	13
5.2 Dampak Tidak Diberlakukannya Ketentuan terkait Prosedur	21
5.3 Implementasi Regulasi Peredaran HHK-HA dan Dinamika Peredaran HHK	24
5.4 Dinamika Peredaran HHK-HA di Sorong	24
5.5 Potret Penyimpangan oleh Pemegang Izin Berusaha dan Investasi HHK-HA: Dari Orde Lama hingga Reformasi	29
5.6 Ketidaksesuaian Praktik Prosedural HHK-HA dan Resolusi	34
5.6.1. Ketidaksesuaian	34
5.6.2. Resolusi	38
VI PENUTUP	40
6.1 Simpulan	40
6.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	44
RIWAYAT HIDUP	50



DAFTAR TABEL

1	Perangkat aturan prosedur peredaran HHK-HA	15
2	Eliminasi pasal-pasal pascarevisi	18
3	Rekap volume dan harga kayu bulat pada bulan September 2022	21
4	Kalkulasi kerugian negara berdasarkan tarif PSDH/DR	23
5	Dampak kebijakan terhadap kesesuaian prosedur peredaran HHK-HA	35
6	Pengaruh intervensi kebijakan yang sentris oleh pusat kepada Pemda Papua	37

DAFTAR GAMBAR

1	Rantai pasar	28
2	Kebijakan pusat vs kebijakan daerah khusus Papua	33

DAFTAR LAMPIRAN

1	Responden instansi KPHP Unit II Sorong dan instansi terkait lainnya	45
2	Pos pengawasan peredaran hasil hutan KPHP Unit II Sorong	46
3	Dokumentasi kegiatan penelitian	49